

## ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) – BARANG MILIK DAERAH (BMD) PADA DPPKAD KABUPATEN PEMALANG

**Annafia Utami<sup>1</sup>, Yeni Priatna Sari<sup>2</sup>**

Email: [anna\\_shape56@yahoo.com](mailto:anna_shape56@yahoo.com)

<sup>1,2</sup> Politeknik Harapan Bersama Jln. Mataram No.09 Tegal Telp/Fax(0283) 352000

### Abstrak

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pemalang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif yang mengacu pada nilai interval yang ada untuk mengukur efektivitas dan mendeskripsikan hasil dari pengukuran tersebut. Dari hasil analisis data yang dihitung berdasarkan masing-masing indikator diperoleh; Pertama, Kualitas Sistem memperoleh 3,2. Kedua, Kualitas Informasi memperoleh 3,3. Ketiga, Kualitas Pengelolaan memperoleh 3,4. Keempat, Kepuasan Pengguna Sistem memperoleh 3,2. Dan indikator terakhir, Kinerja Pengelolaan memperoleh 2,9. Dari beberapa indikator tersebut diperoleh rata-rata variabel sebesar 3,2 yang berada pada nilai interval 2,45 – 3,2 dan menunjukkan efektif. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pemalang sudah efektif.

**Kata kunci:** *Efektivitas, SIMDA-BMD*

### 1. Pendahuluan

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik Negara dan daerah serta mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan tata kelola pengelolaan barang milik Negara atau daerah yang baik. Sejalan juga dengan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik Negara dan daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang perubahan PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, yang mengatur pemisahan fungsi antara pengelola barang dan pengguna barang,<sup>[1]</sup> yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.<sup>[2]</sup> Dalam kaitan dengan pelaksanaan ketentuan diatas, menuntut adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan

barang milik Negara/daerah. Namun demikian dengan adanya perubahan peraturan menyangkut pengelolaan barang milik daerah, Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah secara optimal yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Maka dengan berbagai pertimbangan dan pengamatan dilingkungan serta kemajuan teknologi informasi yang ada, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi agar dapat mempermudah proses pengelolaan data Barang Milik Daerah. Hal ini disebabkan oleh terjadinya peningkatan total volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari tahun ke tahun. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah agar dapat dikelola secara optimal sesuai PP Nomor 27 tahun 2014.<sup>[3]</sup>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor pemerintah yang responsif, interaktif dan terpercaya untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih serta sesuai amanat PP No.60 tahun 2008 pasal 59 ayat (2) dan Inpres No.4 tahun 2011, BPKP dalam hal ini Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah yang baik. Sejalan dengan RPJM tahun 2010-2014 dalam Renstra tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Daerah telah menetapkan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah sebagai kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja. Untuk mendukung tujuan tersebut, sejak tahun 2003 Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang menghasilkan Program Aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji, dan SIMDA Pendapatan. Program Aplikasi dari Sistem Informasi Manajemen Daerah yang digunakan untuk pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah-Barang Milik Daerah yang mengelola barang berikut perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.<sup>[4]</sup>

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) merupakan perangkat lunak yang dikembangkan dengan tujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam membuat laporan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan mulai dari penyusunan anggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD. Produk-produk yang dihasilkan dari pengembangan Sistem

Informasi Manajemen Daerah diantaranya, pertama Program Aplikasi SIMDA Keuangan yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya, kedua Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD) yang digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah, ketiga Program Aplikasi SIMDA Gaji yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengelolaan penggajian pegawainya. Aplikasi ini akan membantu Pemda memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan, keempat Program Aplikasi SIMDA Pendapatan, tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah serta agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan, kelima Program Aplikasi Komputer SIMDA – BMD yang digunakan untuk melakukan proses pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara otomatis dengan memanfaatkan pengolahan data elektronik. Menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi Pengolahan BMD digunakan untuk mencatat dan mengadministrasikan mutasi barang daerah atau aset tetap daerah sesuai ketentuan. Diharapkan program aplikasi ini akan dapat memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah, baik di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah, yang dalam hal ini selalu berhubungan dengan administrasi semua jenis aset dan barang milik daerah.<sup>[4]</sup>

Permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya adalah dalam penyusunan laporan Aset Daerah yang kurang baik, kurang akurat dan kurang andal selama penyusunan laporan tersebut dilakukan secara manual, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya menerapkan

penggunaan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Aset Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat jelas begitu penting peranan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD), maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)–Barang Milik Daerah (BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pemalang”.

**2. Metode Penelitian**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Metode ini menggunakan perhitungan statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif menganalisis data populasi dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, dan tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan nilai interval sebagai alat ukur efektivitas lalu mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari pengukuran efektivitas tersebut. Berikut penjelasan mengenai pengorganisasian data yang dibutuhkan untuk mengukur efektivitas penggunaan SIMDA-BMD pada DPPKAD Kabupaten Pemalang:

Pengorganisasian data:

- a. Mencari Mean atau bisa disebut angka rata-rata skor yang diperoleh, dalam tahap ini peneliti terlebih dahulu mencari rata-rata skor setiap kuesioner dengan rumus:

$$Mk = \sum X / N$$

- b. Mencari Mean atau nilai rata-rata disetiap indikator dengan menggunakan rumus:

$$Mi = \sum Mk / N$$

- c. Membuat Nilai Interval

$$C = a - b / 4$$

$$C = 4 - 1 / 4$$

= 0,75 (untuk panjang kelas interval)

Keterangan:

a : Skor tertinggi

b : Skor terendah

**Tabel 1.**Nilai Interval

No	Kriteria	Nilai Interval
1	Sangat Efektif	3,25 - 4
2	Efektif	2,45 - 3,2
3	Tidak Efektif	1,65 - 2,4
4	Sangat Tidak Efektif	1 - 1,6

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

- d. Perhitungan menentukan persentase efektivitas

$$Mv = \sum Mv / N$$

- e. Mempersentasekan hasil perhitungan variabel

$$\frac{\text{nilai yang dihasilkan}}{\text{nilai skor tertinggi}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rata-rata nilai peritem kuesioner untuk kemudian dihitung lagi rata-rata setiap indikator yang kemudian dikategorikan sesuai dengan kriteria ukuran nilai efektivitas pada tingkat interval. Perhitungan rata-rata nilai per item kuesioner pada setiap indikator dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menghitung rata-rata nilai per indikator. Hasil dari nilai rata-rata indikator digunakan untuk menghitung nilai rata-rata variabel efektivitas. Kemudian hasil dari perhitungan nilai rata-rata variabel efektivitas digunakan untuk menentukan persentase yang kemudian dinyatakan dalam bentuk kata-kata untuk dideskripsikan agar mudah dipahami.<sup>[5]</sup>

**3. Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebar kepada responden Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Pemalang sebanyak 10 orang, antara lain berdasarkan jenis

kelamin, umur dan pendidikan terakhir, maka diperoleh data responden sebagai berikut :

**Tabel 2.** Karakteristik Responden

Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	9	90%
Perempuan	1	10%
<b>Usia</b>		
20 – 30	3	30%
31 – 40	4	40%
41 – 50	2	20%
50 – 60	1	10%
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
S2	2	20%
S1	5	50%
D3	2	20%
SMA	1	10%

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Variabel pada penelitian ini adalah efektivitas penggunaan SIMDA-BMD, sedangkan indikator yang digunakan adalah indikator kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pengelolaan, kepuasan pengguna sistem dan kinerja pengelolaan.

Hasil pembahasan untuk setiap indikator dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator Kualitas Sistem

**Tabel 3.** Indikator Kualitas Sistem

No. Kuesioner	Interval Nilai				ΣX	Mk
	ST S	T S	S S	S S		
1	0	0	18	16	34	3,4
2	0	6	15	8	29	2,9
3	0	0	18	16	34	3,4
4	0	0	18	16	34	3,4
5	0	0	21	12	33	3,3
6	0	0	18	16	34	3,4
7	0	6	15	8	29	2,9
<b>Jumlah Rata-rata (Mean) Indikator Kualitas Sistem</b>						<b>22,7</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Berdasarkan Tabel 3 yang menunjukkan hasil tujuh kuesioner, maka dilanjutkan dengan mengukur rata-rata variabel efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Mi &= \sum Mk / N \\
 &= 22,7 / 7 \\
 &= 3,2
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan dari indikator Kualitas Sistem adalah sebesar 3,2 dan jumlah tersebut masuk dalam nilai interval 2,45 –3,2 yang mempunyai arti Efektif. Maka kualitas sistem dari program aplikasi ini memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang menyangkut keamanan data.

b. Indikator Kualitas Informasi

**Tabel 4.** Indikator Kualitas Informasi

No. Kuesioner	Interval Nilai				ΣX	Mk
	ST S	T S	S S	SS		
1	0	0	24	8	32	3,2
2	0	2	18	12	32	3,2
3	0	0	18	16	34	3,4
4	0	0	21	12	33	3,3
5	0	0	21	12	33	3,3
<b>Jumlah Rata-rata (Mean) Indikator Kualitas Informasi</b>						<b>16,4</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Berdasarkan Tabel 4 yang menunjukkan hasil lima kuesioner, maka dilanjutkan dengan mengukur rata-rata variabel efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Mi &= \sum Mk / N \\
 &= 16,4 / 5 \\
 &= 3,3
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan dari indikator Kualitas Informasi adalah sebesar 3,3 dan jumlah tersebut masuk dalam nilai interval 3,25– 4 yang mempunyai arti Sangat Efektif, maka kualitas informasi dari program aplikasi ini sudah menghasilkan informasi yang akurat dan andal.

c. Indikator Kualitas Pengelolaan

**Tabel 5.** Indikator Kualitas Pengelolaan

No. Kuesioner	Interval Nilai				ΣX	Mk
	STS	TS	S	SS		
1	0	2	18	12	32	3,2
2	0	2	18	16	36	3,6
3	0	0	21	12	33	3,3
4	0	0	21	12	33	3,3
<b>Jumlah Rata-rata (Mean) Indikator Kualitas Pengelolaan</b>						<b>13,4</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Berdasarkan Tabel 5 yang menunjukkan hasil empat kuesioner, maka dilanjutkan dengan mengukur rata-rata variabel efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Mi &= \sum Mk / N \\
 &= 13,4 / 4 \\
 &= 3,4
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan dari indikator Kualitas Pengelolaan adalah sebesar 3,4 dan jumlah tersebut masuk dalam nilai interval 3,25 – 4 yang mempunyai arti Sangat Efektif, maka kualitas pengelolaan dari program aplikasi ini telah mendukung dalam kegiatan pengelolaan Aset Daerah.

d. Indikator Kepuasan Pengguna Sistem

**Tabel 6.** Indikator Kepuasan Pengguna Sistem

No. Kuesio ner	Interval Nilai				ΣX	Mk
	STS	S	S	SS		
1	0	0	21	12	33	3,3
2	0	0	27	4	31	3,1
3	0	0	24	8	32	3,2
4	0	0	21	12	33	3,3
<b>Jumlah Rata-rata (Mean) Indikator Kepuasan Pengguna Sistem</b>						<b>12,9</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Berdasarkan Tabel 6 yang menunjukkan hasil empat kuesioner, maka dilanjutkan dengan mengukur rata-rata variabel efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Mi &= \sum Mk / N \\
 &= 12,9 / 4 \\
 &= 3,2
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan dari indikator Kepuasan Pengguna Sistem adalah sebesar 3,2 dan jumlah tersebut masuk dalam nilai interval 2,45 – 3,2 yang mempunyai arti Efektif, maka bisa dikatakan pengguna sistem merasa cukup puas karena penggunaan program aplikasi ini dapat menyelesaikan pengelolaan Aset Daerah secara efektif dan efisien.

e. Indikator Kinerja Pengelolaan

**Tabel 7.** Indikator Kinerja Pengelolaan

No. Kuesioner	Interval Nilai				ΣX	Mk
	STS	TS	S	SS		
1	0	8	12	8	28	2,8
2	0	8	15	4	27	2,7
3	0	0	27	4	31	3,1
4	0	0	27	4	31	3,1
5	0	8	15	4	27	2,7

6	0	8	12	8	28	2,8
<b>Jumlah Rata-rata (Mean) Indikator Kinerja Pengelolaan</b>						<b>17,2</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Berdasarkan Tabel 7 yang menunjukkan hasil enam kuesioner, maka dilanjutkan dengan mengukur rata-rata variabel efektivitas sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Mi &= \sum Mk / N \\
 &= 17,2 / 6 \\
 &= 2,9
 \end{aligned}$$

Jadi, hasil perhitungan dari indikator Kinerja Pengelolaan adalah sebesar 2,9 dan jumlah tersebut masuk dalam nilai interval 2,45 – 3,2 yang mempunyai arti Efektif, maka bisa dikatakan program aplikasi ini sangat membantu menyelesaikan pekerjaan pengelolaan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil rekapitulasi pencapaian skor pada variabel penggunaan indikator pada variabel penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD), untuk mengetahui rata-rata keseluruhan pencapaian skor pada variabel penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 8.** Hasil Rata-rata Variabel Penelitian

No.	Indikator	Rata-rata Indikator	Ket
1	Kualitas Sistem	3,2	Efektif
	Kualitas		Sangat
2	Informasi	3,3	Efektif
	Kualitas		Sangat
3	Pengelolaan	3,4	Efektif
	Kepuasan		
	Pengguna		
4	Sistem	3,2	Efektif
	Kinerja		
5	Pengelolaan	2,9	Efektif
<b>Rata-rata Variabel</b>		<b>3,2</b>	<b>Efektif</b>

Sumber: Data diolah untuk penelitian (2016)

Dari Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa rata-rata variabel dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) sebesar 3,2

yang masuk dalam kategori Efektif. Adapun indikator yang capaian rata-ratanya paling tinggi yaitu pada Kualitas Pengelolaan sebesar 3,4, dengan demikian dapat dikatakan bahwa program aplikasi ini dapat membantu pengelolaan Aset Daerah secara efektif. Sedangkan indikator yang capaian rata-ratanya paling rendah yaitu pada Kinerja Pengelolaan sebesar 2,9, yang dapat diartikan bahwa kinerja dari aplikasi ini sudah cukup cepat dalam pemrosesan datanya. Hasil rata-rata selanjutnya dipersentasekan untuk menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) yaitu sebesar 80%, artinya sudah efektif dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Pematang Jaya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) pada DPPKAD Kabupaten Pematang Jaya memperoleh nilai rata-rata variabel sebesar 3,2 yang berada pada nilai interval 2,45 – 3,2 yang berarti dapat dikatakan Efektif. Dan persentase yang dihasilkan dari perhitungan tersebut sebesar 80%. Dengan demikian usaha Pemerintah Daerah dalam memecahkan masalah yang terjadi pada pengelolaan Aset Daerah dengan menggunakan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) – Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pematang Jaya dapat dikatakan cukup berhasil, dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan untuk mengukur efektivitas dari penggunaan SIMDA-BMD tersebut.

#### 5. Daftar Pustaka

- [1] Peraturan Pemerintah No.38 tahun 2008 tentang perubahan PP No.6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- [2] Permendagri No.17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- [3] Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- [4] <http://www.bpkp.go.id> diakses pada 11 Maret 2016
- [5] Irfianto, Siswo Dwi, dan Utami, Dian Arlupi, 2013, Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) di Kabupaten Gresik